

Judul : Komisi XII: lindungi daya beli masyarakat
Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Penataan BBM Subsidi Komisi XII: Lindungi Daya Beli Masyarakat

FOTO: DPR.CO.ID



Jamaludin Malik

SENAYAN mendukung langkah Pemerintah yang tengah menyiapkan penataan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat mampu. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah memastikan subsidi dan kompensasi energi semakin tepat sasaran.

Anggota Komisi XII DPR Jamaludin Malik mengatakan, langkah Pemerintah ini sudah tepat dan patut didukung. Anggaran negara untuk sektor energi mesti memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Bukan justru lebih banyak dinikmati kelompok ekonomi atas.

Penataan penerima Pertalite, kata Jamaludin, menunjukkan kebijakan pemerintah yang adil dan seimbang. Di satu sisi, Pemerintah tetap menjaga harga BBM bersubsidi agar daya beli masyarakat terlindungi. "Di sisi lain, ketepatan penerimaannya terus diperbaiki agar anggaran negara dapat digunakan secara efektif," ujarnya di Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Sebelumnya, Pemerintah membahas rencana pembatasan penyaluran BBM bersubsidi dalam rapat koordinasi yang dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Dalam rapat tersebut, Menkeu Purbaya menyampaikan masyarakat yang masuk

dalam desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli BBM bersubsidi, termasuk Pertalite. Kebijakan itu diarahkan untuk memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran dan tidak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan lebih tinggi.

"Kami akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa. Kalau, misalnya, desil 10 saya setop nggak boleh beli Pertalite, bagaimana dampaknya ke ekonomi. Jadi, kita akan bertahap," terang Purbaya.

Diketahui, desil 9 mencakup rumah tangga dengan pengeluaran Rp 3,5 juta hingga Rp 5 juta per kapita per bulan, sedangkan desil 10 merupakan rumah tangga dengan pengeluaran di atas Rp 5 juta per kapita per bulan.

Jamaludin melanjutkan, masyarakat mampu, terlebih pemilik kendaraan mewah, sudah semestinya menggunakan BBM nonsubsidi. Pertalite yang harganya mendapat dukungan Pemerintah memang diprioritaskan bagi masyarakat kecil, pekerja, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta sektor-sektor produktif yang membutuhkan.

Namun, ia mengingatkan, agar kebijakan diterapkan secara bertahap dengan didukung data sosial ekonomi dan data kendaraan yang akurat serta terintegrasi. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi secara luas sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. "Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya berhak justru kehilangan akses akibat kesalahan data," kata politisi Golkar ini mengingatkan.

Karena itu, verifikasi mesti dilakukan secara cermat dan Pemerintah perlu menyediakan mekanisme pengaduan serta perbaikan data yang mudah dijangkau masyarakat. "Kami akan mengawal kebijakan tersebut agar pelaksanaannya berlangsung transparan, berkeadilan, serta mampu menjaga daya beli dan memperkuat ketahanan energi nasional," tandas legislator asal Jawa Tengah (Jateng) ini. ■ TIF